



**KONTRAK PERJANJIAN PENDANAAN
ANTARA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DENGAN
DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SKIM : IPTEK BERBASIS PROGRAM STUDI DAN NAGARI BINAAN (lbPSNB)
DANA BOPTN TAHUN ANGGARAN 2019**

Nomor: T/7/UN.16.17/PM.lbPSNB/LPPM/2019

Pada hari ini Selasa tanggal Enam belas bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dr.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas, Alamat: Rektorat Universitas Andalas Kampus Limau Manis Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada LPPM Universitas Andalas selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. RIA ARIANY : Sebagai Ketua Pelaksana Penugasan Program Pengabdian Skim IPTEK BERBASIS PROGRAM STUDI DAN NAGARI BINAAN (lbPSNB), Dosen Fakultas FISIP Universitas Andalas. bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana pengabdian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pengabdian/mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian Skim IPTEK BERBASIS PROGRAM STUDI DAN NAGARI BINAAN (lbPSNB), sesuai dengan Kontrak Nomor: 4618/XIV/R/KPT/2019, Tanggal 15 Juli 2019, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

**PASAL 1
DASAR HUKUM**

Kontrak Pengabdian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 698/M/Kp/XII/2015, tentang pejabat perbendaharaan pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.2/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2017;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian Reviewer Pengabdian;
14. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28/E/KPT/2017 tentang Penerima Pendanaan Pengabdian;
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2019 tanggal 5 Desember 2018;
16. Surat Keputusan (SK) Rektor Nomor: 4618/XIV/R/KPT/2019, Tanggal **15 Juli 2019** tentang Nama Penerima Dana Pengabdian Kepada Masyarakat Skim IPTEK BERBASIS PROGRAM STUDI DAN NAGARI BINAAN (IbPSNB) Tahun 2019.

PASAL 2

Ruang Lingkup Kontrak

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dan sebagai penanggungjawab kontrak untuk melaksanakan, menyelesaikan, dan menghasilkan luaran kegiatan Tahun Anggaran 2019 dengan judul;

PELATIHAN PENGUATAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI (BPRN) DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI DI NAGARI SUMANIK KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2019

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan serta tercapainya luaran wajib atas pekerjaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 3

Dana Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar **Rp. 10000000. . ,- (Sepuluh Juta Rupiah)** yang sudah termasuk pajak.

- (2) Dana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Andalas Nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2019 tanggal 5 Desember 2018.

PASAL 4

Tata Cara Pembayaran Dana Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Pendanaan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Pembayaran sebesar 100% dari total bantuan dana kegiatan yaitu **Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)**
 - b) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) butir a, dan b sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- (2) Pembayaran sebesar 100% sebagaimana pada ayat (2) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah menandatangani kontrak ini dan membuat serta melengkapi **Rancangan Pelaksanaan** kepada masyarakat, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan Pengabdian kepada Masyarakat berupa luaran yang akan dicapai, dengan **format standar**, dan menyerahkannya **sebelum** penandatanganan kontrak ini.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikembalikan ke kas Negara apabila **PIHAK KEDUA** telah mengunggah **selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2019** atas kewajiban pelaksana kegiatan ke **SIMLITABMAS Unand**, luaran-luaran wajib sebagai berikut:
- a. Laporan akhir kegiatan dengan lampiran *logbook* kegiatan, dan
 - b. Laporan penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat 100%, dan
 - c. *Bukti submitted article* dari penerbit publikasi jurnal nasional/internasional beserta artikelnya, dan
 - d. *Bukti submitted article* dari panitai konferensi/seminar tingkat nasional/internasional beserta abstrak/artikelnya, dan
 - e. Artikel koran/media massa cetak/media massa elektronik tahun 2019 dengan penulis ketua dan/atau anggota atau berita yang relevan yang ditulis wartawan dimana nama pelaksana kegiatan tercantum di dalam berita tersebut, dan
 - f. *Draft* buku minimal berisi dua bab yang relevan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan formulir yang telah diisi untuk rencana pendaftaran hak cipta buku tersebut, dan
 - g. *Softcopy* poster hasil pengabdian kepada masyarakat (dengan tipe pdf, 1 halaman dengan ukuran kertas A1 dengan posisi portrait), dan
 - h. *Softcopy* profil mitra, kelompok masyarakat atau wirausaha atau mitra berbadan hukum dengan melampirkan Surat Keterangan/SK pendirian/SIUP/sertifikat PIRT/sejenisnya, dan
 - i. *Softcopy* profil luaran produk berupa prototipe/model/desain/teknologi tepat guna (TTG)/program/ rekayasa sosial/kebijakan yang diterapkan pada Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (dengan tipe pdf, 1-2 halaman, dengan format sesuai standar), dan
 - j. Bukti kehadiran absensi dan nilai monitoring dan evaluasi sesuai jadwal LPPM, dan
 - k. Abstrak dari artikel pengabdian kepada masyarakat yang belum dipublikasikan untuk seminar hasil internal di Unand yang akan diselenggarakan oleh LPPM pada tanggal 18-24 November 2019 atau dengan tanggal lain yang ditentukan oleh LPPM.
- (4) Luaran-luaran wajib pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (3) wajib dilengkapi. Sanksi bagi yang tidak melengkapi, dana 100% dikembalikan ke Kas Negara dan tidak memperoleh peluang kontrak penugasan tahun-tahun selanjutnya.

- (5) Dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tahun 2019 ini **PIHAK PERTAMA** diharapkan dapat menghasilkan **luaran-luaran tambahan untuk memperoleh dana insentif tambahan**, yaitu:
- a. Buku terbitan perdana atau edisi baru ber-ISBN;
 - b. Kekayaan intelektual (paten, hak cipta, merek, PVT, dan sebagainya) dengan status terdaftar, *granted*, dan/atau telah digunakan oleh mitra tahun 2019,
 - c. Sertifikat-sertifikat perusahaan atau produk mitra yang dibina,
 - d. Artikel terbit di publikasi jurnal atau media massa,
 - e. Produk prototipe yang telah berkemasan, berlogo, dan bermerek.
- (6) Dana Pengabdian kepada Masyarakat dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	: Ria Ariany
Nomor Rekening	: 21020210077024
Nama Bank	: BPD SUMATERA BARAT
NPWP	: 154488563201000

- (7) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi dan tidak memeriksa kebenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan persyaratan lainnya.

PASAL 5 **Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dimaksud dalam Pasal 1 adalah berakhir pada tanggal 15 Desember 2019.

PASAL 6 **Target Luaran**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran **wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat 3.**
- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran **tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat 5.**
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada **PIHAK PERTAMA** dan diunggah ke **SIMLITABMAS LPPM Unand.**
- (4) Perolehan luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

PASAL 7

Laporan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan akhir komprehensif mengenai luaran Pengabdian kepada Masyarakat dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan akhir pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan lampiran catatan harian pelaksanaan serta Surat Pernyataan Tanggungjawab

Belanja (SPTB) sesuai format standar atas dana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan ke SIMLITABMAS LPPM Unand paling lambat **15 Desember 2019**.

- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan CD berisi *softcopy* Laporan, Catatan Harian Pengabdian kepada Masyarakat, dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 100% kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **15 Desember 2019** atau jika diminta sewaktu-waktu untuk pemeriksaan.
- (4) **PIHAK KEDUA** harus telah mengunggah dokumen-dokumen komprehensif dan luaran-luaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat 3 sesuai standar atas kewajiban pelaksana pengabdian, selambat-lambatnya tanggal **15 Desember 2019** ke laman **SIMLITABMAS LPPM Unand**:
- (5) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan/atau terlambat mengunggah laporan akhir dan luaran lainnya tersebut di ayat (3) dan (4) ke **Simlitabmas LPPM Unand**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa pengembalian dana 100% dan tidak dapat mengajukan proposal Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (6) Laporan keuangan dengan bukti-bukti asli penggunaan dana Pengabdian kepada Masyarakat ini disimpan di **PIHAK KEDUA** yang sewaktu-waktu dapat diperlukan untuk pemeriksaan,
- (7) Laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran halaman A4, huruf Times New Romans ukuran 12 dan spasi 1,5;
Di bagian bawah sampul/cover ditulis:

Dibiayai oleh:

Dana BOPTN UNIVERSITAS ANDALAS

Sesuai dengan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat

Nomor: T/7/UN.16.17/PM.IbPSNB/LPPM/2019 Tahun Anggaran 2019

PASAL 8

Hak dan Kewajiban Para Pihak

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 3;
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana Pengabdian kepada Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membaca, memahami dan menandatangani Surat Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini,
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana Pengabdian kepada Masyarakat dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dengan judul ;
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana Pengabdian kepada Masyarakat yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
- e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- f. **PIHAK KEDUA** secara pribadi bertanggungjawab mutlak atas semua pekerjaan dan/atau semua dokumen pelaksanaan pekerjaan termasuk pembelanjaan dana dan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

- f. **PIHAK KEDUA** secara pribadi bertanggungjawab mutlak atas semua pekerjaan dan/atau semua dokumen pelaksanaan pekerjaan termasuk pembelanjaan dana dan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- g. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyimpan laporan pelaksanaan pekerjaan Pengabdian kepada Masyarakat dan laporan keuangan kegiatan beserta rekapitulasinya yang sewaktu-waktu dapat diperlukan untuk pemeriksaan,
- h. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak terbelanjakan dan/atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Negara.
- i. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan fotocopy bukti pengembalian dana ke Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9 **Monitoring dan Evaluasi**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban hadir pada **monitoring dan evaluasi internal** serta **Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat** yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan Evaluasi internal dan Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat di dalam Unand yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengembalikan dana 100% tersebut ke Kas Negara dan **PIHAK PERTAMA** menyimpan bukti setor ke kas negara tersebut.

Pasal 10 **Penilaian Luaran**

Penilaian luaran pengabdian dilakukan oleh Komite Penilai/Reviewer Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11 **Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan**

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat dibenarkan apa bila telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua LPPM Universitas Andalas.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana Pengabdian kepada Masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (4) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12 Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir beserta seluruh luarannya, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa pengembalian dana 100% dan tidak dapat mengajukan proposal Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 3, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13 Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Pengabdian kepada Masyarakat "PELATIHAN PENGUATAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI (BPRN) DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI DI NAGARI SUMANIK KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2019" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dengan Pengabdian kepada Masyarakat lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Pengabdian kepada Masyarakat ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14 Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10%,
 2. PPh Pasal 22 sebesar 1,5%,
 3. Pajak honorarium (PPh) Pasal 21:
 - a. Untuk golongan III yang memiliki NPWP sebesar 5% dan yang tidak memiliki NPWP sebesar 6%,
 - b. Untuk golongan IV sebesar 15%.
 4. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku,
- menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan **NPWP PIHAK KEDUA** atau Pihak yang bersangkutan ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15 Peralatan dan/alat Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Hasil Pelaksanaan Pengabdian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Pengabdian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Andalas melalui Berita Acara Serah Terima (BAST), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 **Hak Kekayaan Intelektual**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan agar hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan menghasilkan berbagai luaran sesuai target yang dijanjikan dalam proposalnya dan melaporkannya kepada **PIHAK PERTAMA** secara berkala,
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (3) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos atau luaran dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil Pengabdian kepada Masyarakat ini wajib mencantumkan pemberi dana yang dinyatakan dalam bentuk ucapan terima kasih atau *acknowledgement* dalam bahasa Inggris, sebagai berikut:

Pengabdian kepada Masyarakat ini Dibiayai oleh:
UNIVERSITAS ANDALAS
Sesuai dengan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat
Nomor: T/7/UN.16.17/PM.IbPSNB/LPPM/2019
Tahun Anggaran 2019

Pasal 17 **Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 18 **Lain-lain**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- (3) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini.
- (5) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal kontrak ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas perjanjian ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



PIHAK KEDUA

RIA ARANY
NIDN. 0013027307